



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU
NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN
LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH
LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dalam Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

~~4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);~~

~~5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran~~

~~Negara Republik Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);~~

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

~~7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);~~

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- ~~4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.~~
- ~~5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.~~
- ~~6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.~~
- ~~7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.~~
- ~~8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi~~

~~lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.~~

9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
- ~~14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.~~
- ~~15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.~~
16. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-

akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

17. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
18. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
19. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

BAB II

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 3

- (1) ~~Tata cara pelaporan meliputi Proses~~ pelaporan tentang yang dilakukan oleh PPAT atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara dalam pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui ~~Kepala~~ Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan ~~pajak daerah~~.
- (2) ~~PPAT atau Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak berupa SSPD BPHTB.~~
- (3) ~~Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara hanya dapat menandatangani Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak berupa SSPD BPHTB.~~
- (4) ~~Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah~~

~~setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak berupa SSPD BPHTB.~~

- ~~(5) PPAT atau Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.~~
- ~~(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.~~

Pasal 4

- (1) PPAT atau Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara membuat dan mengirimkan laporan hasil pembuatan akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan kepada Bupati ~~up. Kepala~~ melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ~~dengan melampirkan fotokopi SSPD BPHTB.~~
- (2) ~~Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang memuat:~~
 - ~~a. laporan yang di dalamnya berisi judul Laporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Bulan Laporan;~~
 - ~~b. nomor yang di dalamnya berisi nomor urut yang dimulai dengan angka terkecil;~~
 - ~~c. tanggal, bulan, tahun yang di dalamnya berisi tanggal, bulan dan tahun registrasi berkas permohonan BPHTB;~~
 - ~~d. nama Wajib Pajak yang di dalamnya berisi nama orang pribadi/Badan sesuai dengan kartu tanda penduduk/ akta pendirian Badan;~~
 - ~~e. alamat Wajib Pajak yang di dalamnya berisi alamat orang pribadi/badan sesuai dengan kartu tanda penduduk/ akta pendirian Badan;~~

- ~~f. alamat objek Pajak yang di dalamnya berisi alamat letak/lokasi objek Pajak;~~
- ~~g. nomor objek PBB P2 yang di dalamnya berisi Nomor Objek PBB P2 sebagaimana tercantum dalam SPPI' PBB P2;~~
- ~~h. Nomor Pokok Wajib Pajak di dalamnya berisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak BPHTB;~~
- ~~i. nomor hak yang di dalamnya berisi nomor sertifikat tanah yang dimohonkan transaksi BPHTB;~~
- ~~j. luas tanah yang di dalamnya berisi luasan tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat tanah;~~
- ~~k. NJOP tanah yang di dalamnya berisi NJOP tanah/m² sebagaimana tercantum dalam SPPI' PBB P2;~~
- ~~l. luas bangunan yang di dalamnya berisi luasan bangunan perolehan atau sebagaimana luasan bangunan yang tercantum dalam SPPI' PBB P2;~~
- ~~m. NJOP bangunan yang di dalamnya berisi NJOP bangunan/m² sebagaimana tercantum dalam SPPI' PBB P2;~~
- ~~n. NJOP PBB P2 yang di dalamnya berisi NJOP sebagaimana tercantum dalam SPPI' PBB P2 untuk perhitungan ketetapan PBB P2;~~
- ~~o. Nilai Perolehan Objek Pajak yang di dalamnya berisi nilai transaksi/ nilai pasar tanah dan bangunan yang dimohonkan BPHTB;~~
- ~~p. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak di dalamnya berisi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan secara regional paling banyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) sederajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak~~

~~ditetapkan secara regional paling banyak
Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);~~

- ~~q. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak di dalamnya berisi
nilai perolehan objek pajak yang terkena pajak;~~
- ~~r. BPHTB yang terutang di dalamnya berisi nilai BPHTB yang
harus dibayarkan;~~
- ~~s. jenis perolehan BPHTB yang di dalamnya berisi jenis
transaksi BPHTB yang terdiri atas:~~
 - ~~1. pemindahan hak karena jual beli;~~
 - ~~2. tukar menukar;~~
 - ~~3. hibah;~~
 - ~~4. hibah wasiat;~~
 - ~~5. waris;~~
 - ~~6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;~~
 - ~~7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;~~
 - ~~8. penunjukan pembeli dalam Lelang;~~
 - ~~9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;~~
 - ~~10. penggabungan usaha;~~
 - ~~11. peleburan usaha;~~
 - ~~12. pemekaran usaha;~~
 - ~~13. hadiah;~~
 - ~~14. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak
atau di luar pelepasan hak;~~
 - ~~15. keterangan yang di dalamnya berisi dibayar atau
belum dibayar;~~
 - ~~16. nama, tempat, dan tanggal, bulan, serta tahun
dibuatnya laporan; dan~~
 - ~~17. nama PPAT atau Notaris dan Pejabat Kepala Kantor
yang membidangi pelayanan Lelang negara, tanda
tangan dan stempel jabatan.~~

- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- ~~(4) PPAT atau Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan.~~
- ~~(5) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Pasal 5

- (1) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak disampaikan dan/atau terlambat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah atas sanksi administratif berupa denda kepada PPAT atau Notaris.
- ~~(2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, kepala kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan ~~melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah~~ akan menonaktifkan sementara menu pendaftaran (*user id*) dalam akun milik PPAT/Notaris ~~PPATS~~/Kepala Kantor pada aplikasi e-BPHTB apabila:

- a. PPAT/~~PPATS~~ serta Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara belum melaporkan laporan bulanan dimaksud serta membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;

- b. PPAT/PPATS serta Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara belum membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap penandatanganan akta sebelum pembayaran pajak BPHTB;
- c. PPAT/~~PPATS~~ serta Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara belum membayarkan kekurangan pajak BPHTB apabila terdapat Kurang Bayar BPHTB;
- d. Menu booking dalam akun BPHTB online, akan diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan menyerahkan copy Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti pembayaran denda dan laporan.

Pasal 7

Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT atau Notaris tetap membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ~~dengan keterangan NIHIL~~.

~~BAB VII~~

~~KETENTUAN PENUTUP~~

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2025

BUPATI TRENGGALEK

ttd

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

ttd

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN NOMOR ...

NOREG PERATURAN BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA

TIMUR: (NOMOR URUT PERA/TAHUN)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS
DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM
PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

LAPORAN BULANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAU NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG
NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

[illegible]